

PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN PENDIDIKAN INDONESIA

The Effect Of Education Budgets On Indonesian Education Development

Ratna Christianingrum*

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: * ratna.christianingrum@dpr.go.id

Abstract

An evaluation was needed to see if there were significant changes to national development, after the implementation of article 31 of UUD 1945. This budget allocation is able to influence the education development in Indonesia, especially provision and equity of access to quality education. But the physical development carried out has not been followed by an increase in quality education services. A large education budget allocation is also not followed by an improvement in the quality of education.

Keyword: education budget, education development, education quality

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Aset utama dalam proses membangun suatu bangsa adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan tumpuan utama peningkatan kualitas suatu bangsa. Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai melalui proses pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas suatu bangsa (Muhardi, 2004).

Selain untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, pendidikan juga mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sudarsana). Melalui pendidikan sumber daya manusia dapat menjadi lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Tenaga kerja yang menguasai teknologi dan memiliki keahlian khusus dapat diciptakan melalui pendidikan.

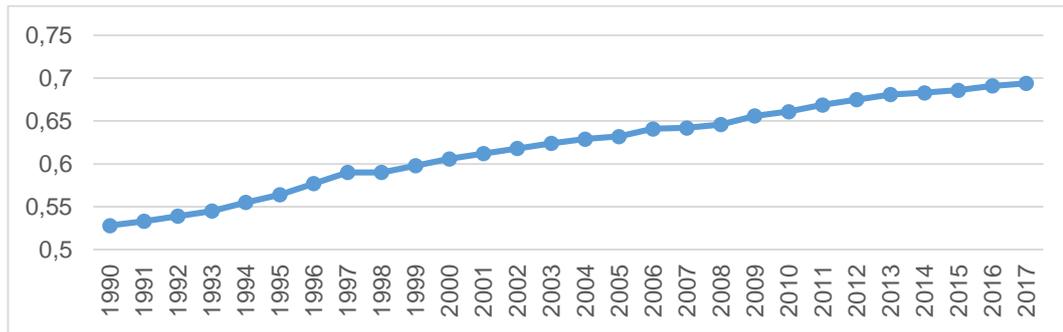
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Schulyz (1963) yang menyatakan bahwa rata-rata pendidikan berkorelasi secara linear terhadap

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi di Jepang dan Korea Selatan kemungkinan besar disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, hal ini terlihat dari tingkat melek huruf (*literacy rate*) yang tinggi, sehingga tenaga kerja mudah menyerap dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan ekonomi yang terjadi (Lim, 1996). Dari beberapa penelitian di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu kunci utama bagi percepatan dan pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan kesejahteraan pada khususnya.

Mengingat pentingnya Pendidikan dalam membangun suatu bangsa, maka pembangunan SDM melalui pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya pada pasal 31 merupakan bukti komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan nasional. UUD 1945 memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Semenjak diamanatkan dalam UUD 1945, secara bertahap pemerintah pusat mulai meningkatkan rasio anggaran pendidikan dalam APBN. Sehingga pada tahun 2009 pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dalam APBN. Semenjak tahun 2009 hingga sekarang, rasio anggaran pendidikan terhadap total belanja dalam APBN selalu lebih besar dari 20 persen dari APBN.

Walaupun telah diamanatkan oleh UUD 1945, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja di APBD belum dilakukan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia. Ari Santoro (Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud) menyatakan bahwa jumlah daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20 persen dari total belanja dalam APBD-nya masih dapat dihitung dengan jari (Republika, 2017). Kondisi ini diperparah dengan adanya daerah yang memasukkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah menjadi bagian APBD-nya. Menurut Prof. Muhadjir Effendy (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), hal ini menyebabkan seolah-olah daerah tersebut telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD. Padahal seharusnya anggaran 20 persen untuk pendidikan harus berasal dari APBD murni daerah yang bersangkutan (Tribunnews.com, 2017).

Gambar 1. Perkembangan HDI

Sumber: UNDP

Human Development Index (HDI) merupakan suatu ukuran yang membandingkan harapan hidup, tingkat membaca (*literacy*), pendidikan, dan standar kehidupan dari seluruh negara di dunia. Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa tiap tahunnya skor HDI mengalami peningkatan. Peningkatan skor HDI yang relatif besar terjadi dalam rentang waktu 1990 hingga 2009. Setelah tahun 2009 tetap terjadi peningkatan skor HDI, namun peningkatan skor HDI tidak sebesar periode sebelumnya. Padahal disaat yang sama, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dalam APBN. Hal ini dapat mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembangunan pendidikan di Indonesia.

Pada tahun 1990 hingga 2017 nilai HDI Indonesia mengalami peningkatan dari 0,528 menjadi 0,694. Berdasarkan nilai HDI ini perkembangan manusia di Indonesia menempati kategori medium (UNDP, 2015). Pada tahun 2016 Indonesia menempati peringkat 110 dari 188 negara dan wilayah dengan skor HDI sebesar 0,684. Pada tahun 2017 indeks pendidikan Indonesia mencapai 0,622 (UNDP, 2018) yang menempatkan Indonesia pada peringkat 116. Berdasarkan peringkat ini, Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya. Indonesia hanya mampu mengungguli Myanmar yang menempati peringkat 161. Indeks pendidikan tertinggi di ASEAN ditempati oleh Singapura dengan skor 0,832. Sedangkan Malaysia menempati peringkat kedua di ASEAN dengan skor 0,719. Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa peningkatan skor HDI di Indonesia tidak secepat peningkatan di negara-negara yang lain dan masih berada di belakang dari negara-negara di ASEAN.

Peningkatan anggaran pendidikan di Indonesia belum diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikannya. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk melihat adakah perubahan yang signifikan pada indikator-indikator pembangunan

pendidikan di Indonesia antara sebelum pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dalam APBN dengan setelah pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dalam APBN. Penelitian ini akan dilakukan pada tingkat nasional mengingat masih adanya permasalahan dalam proses pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

1.2. Rumusan Masalah

Selama hampir satu dekade ini pemerintah telah melaksanakan amanah dari hasil amandemen UUD 1945, khususnya mengenai pembangunan pendidikan nasional. Dengan adanya alokasi anggaran yang dikhususkan untuk sektor pendidikan dengan nominal yang cukup besar, seharusnya terjadi peningkatan pembangunan pendidikan nasional. Namun biaya pendidikan dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia (Sukasni & Efendy, 2017)

Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pemberian alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dalam APBN. Apakah alokasi anggaran pendidikan telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap pembangunan pendidikan nasional? Apabila tidak terjadi perubahan yang signifikan, maka perlu ditelusuri penyebabnya.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen atau lebih dari total belanja dalam APBN telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap indikator-indikator pembangunan pendidikan nasional dan untuk melakukan identifikasi penyebabnya apabila terbukti bahwa pengalokasian anggaran sebesar 20 persen dari total belanja dalam APBN belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan dan/atau kualitas pendidikan nasional.

2. Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan daya

upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pengerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak (Warli & Yuliana, 2011). Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang diberikan kepada anak didik agar tercapai kemampuan yang optimal.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu investasi SDM yang dapat memacu daya saing bangsa. Kebijakan pembangunan pendidikan Indonesia terdiri dari tiga pilar kebijakan dan dijabarkan dalam misi pendidikan 5 K. Misi pendidikan 5 K tersebut adalah 1) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; 2) memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; 3) meningkatkan kualitas layanan pendidikan; 4) mewujudkan kesetaraan layanan pendidikan, dan 5) menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013).

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya mempunyai peran yang sangat menentukan (Supriadi, 2003). Dalam hal ini biaya yang dimaksud mencakup semua jenis penyelenggaraan yang berkenaan dengan semua jenis penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang ataupun tenaga.

Adapun dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses dan hasil belajar dapat diukur sebagaimana asumsi sebagai berikut:

1. Pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seorang baik secara sosial maupun ekonomis. Nilai pendidikan berupa aset moral adalah bentuk kemampuan, kecakapan, keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dipandang sebagai investasi. Pandangan ini diarahkan oleh premis *Human Capital* (SDM sebagai unsur modal). Berdasarkan premis tersebut, besarnya nilai biaya yang digunakan untuk pendidikan dipandang sebagai investasi yang ditanam pendidikan perlu dihitung nilai manfaat atau keuntungan di masa yang akan datang (Schultz T. , 1961)
2. Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu (Jalal & Supriyadi, 2001).
3. Indikator penting yang dapat berpengaruh pada mutu atau kualitas pendidikan diantaranya adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang

pendidikan dan alat-alat bantu proses belajar mengajar yang belum memadai (Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

3. Metode analisis

3.1. Data

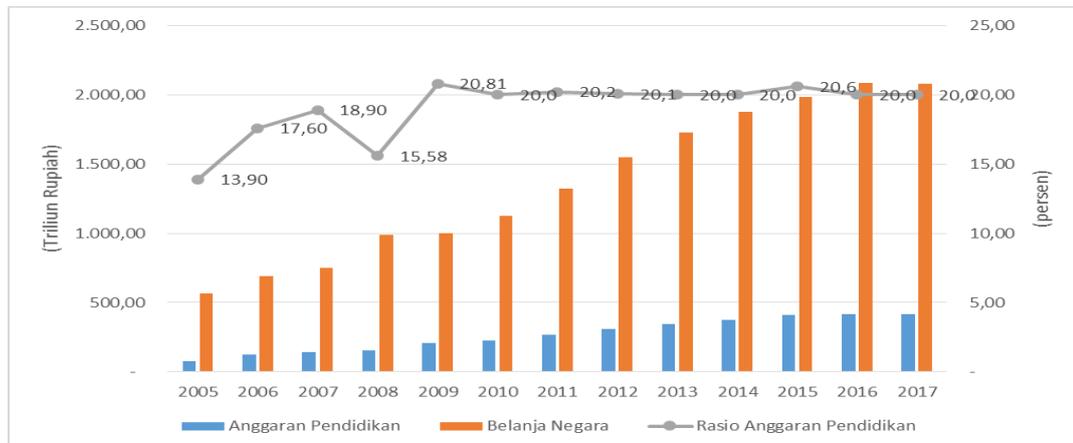
Variabel yang digunakan adalah variabel pembangunan pendidikan di Indonesia. Variabel pembangunan pendidikan diukur dengan menggunakan indikator pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Indikator pendidikan terbagi menjadi lima indikator, yaitu indikator ketersediaan layanan, indikator keterjangkauan layanan pendidikan, indikator kualitas layanan pendidikan, indikator kesetaraan memperoleh layanan pendidikan, dan indikator kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Indikator ketersediaan layanan pendidikan digunakan, yaitu rasio siswa per sekolah, rasio siswa per kelas, rasio kelas per ruang kelas, persentase perpustakaan sekolah, persentase ruang usaha kesehatan sekolah, persentase ruang komputer dan persentase laboratorium.

Indikator keterjangkauan layanan terdiri dari 2 jenis yang akan diukur, yaitu tingkat pelayanan sekolah dan daerah terjangkau. Indikator kualitas layanan pendidikan terdiri dari 6 jenis indikator yang akan diukur, yaitu persentase guru berwenang mengajar, rasio siswa per guru, angka mengulang, angka putus sekolah, dan persentase ruang kelas milik baik. Indikator kesetaraan memperoleh layanan hanya dilihat dari persentase siswa swasta. Indikator kepastian memperoleh layanan menggunakan dua indikator, yaitu angka partisipasi kasar dan angka melanjutkan.

Variabel tersebut akan terbagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN (periode 1) dengan periode setelah alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN (periode 2). Data yang digunakan untuk mengisi periode sebelum alokasi anggaran sebesar 20 persen adalah data pada tahun ajaran 1999/2000 hingga tahun ajaran 2007/2008. Sedangkan data yang digunakan untuk periode sesudah alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN adalah data tahun ajaran 2008/2009 hingga tahun ajaran 2016/2017.

Gambar 2. Perkembangan Anggaran Pendidikan, Belanja Negara dan Rasio Anggaran Pendidikan (2005 - 2017)



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diolah

Tingkat pendidikan yang akan digunakan adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah (SM). SM merupakan gabungan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tahun ajaran yang akan digunakan adalah 1999/2000 hingga 2017/2018. Karena kurangnya ketersediaan data, maka untuk indikator persentase perpustakaan sekolah, persentase ruang sekolah, persentase ruang komputer, persentase laboratorium, tingkat pelayanan sekolah, dan angka melanjutkan untuk tingkat pendidikan SD tidak digunakan. Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan bantuan SPSS. Versi yang akan digunakan adalah SPSS Statistics 20.

3.2. Metode Analisis yang Digunakan

3.2.1 Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan uji Normalitas Data. Uji normalitas ini diperlukan untuk menentukan metode apa yang akan digunakan. Apabila dari uji normalitas diperoleh bahwa kedua kelompok data berdistribusi normal, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode *Independent Sample T-test*. Namun apabila salah satu dari kelompok data atau kedua kelompok data tidak mengikuti distribusi normal, maka data akan dianalisis dengan menggunakan *Non Parametric Test*.

Uji Shapiro Wilks merupakan metode uji hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini karena Uji Kolmogorov Smirnov tidak dapat digunakan apabila jumlah sampelnya kecil atau kurang dari 200. Jumlah sampel yang akan

digunakan dalam penelitian ini untuk masing-masing kelompok jumlahnya tidak lebih dari 20 sampel, sehingga Uji Shapiro Wilks lebih tepat untuk digunakan (Park, 2008).

3.2.2 Independent Sample *T*-Test

1. Uji Homogenitas Varian

Uji homogenitas varian diperlukan untuk menentukan metode analisis yang akan digunakan. Apabila hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa varian dari kedua kelompok adalah sama maka metode analisis yang akan digunakan adalah Uji T dengan asumsi variannya sama. Sedangkan apabila hasil uji menunjukkan bahwa varian dari kedua kelompok, maka metode analisis yang digunakan adalah Uji T dengan asumsi varian tidak seragam (Gravetter & Wallnau, 2013).

2. *Non Parametric Test*

Data akan dianalisis dengan metode Uji Mann Withney. Uji Mann Whitney digunakan karena jumlah data yang dimiliki kurang dari 20 data (MacFarland & Yates, 2017).

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Distribusi Sampel

Jumlah total kombinasi variabel dan tingkat pendidikan (*item*) yang digunakan dalam analisis ini sebesar 48. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa terdapat 21 *item* yang berdistribusi normal. *Item* tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode uji T (*T test*).

Sedangkan 27 *item* yang akan dianalisis lebih lanjut dengan metode non-parametrik. Hal ini dikarenakan salah satu atau kedua kelompok data yang akan dibandingkan tidak mengikuti distribusi normal.

4.2 Uji Homogenitas Varian

Dari 21 *item* yang dilakukan uji homogenitas, terdapat 12 *item* yang memiliki variansi yang sama (homogen) (lampiran 2). Selanjutnya kedua belas *item* ini akan dianalisis dengan menggunakan metode Student T-test dengan asumsi varian sama. Sedangkan 9 *item* yang lain menunjukkan adanya varian yang tidak sama dari kedua kelompok. Sehingga *item* ini akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode *student T-test* dengan asumsi varian tidak sama.

4.3 Uji Beda Mean (*T-test*)

Dari 21 *item* yang dianalisis dengan menggunakan metode *Student T-test* terdapat 13 *item* yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara periode 1 dan periode 2 (Lampiran 3). Hal ini dapat diartikan bahwa pengalokasian anggaran sebesar 20 persen dari total belanja APBN memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 13 *item* tersebut. Namun perlu dilakukan analisis dan penelusuran lebih lanjut. *Item* tersebut ialah rasio siswa per sekolah untuk tingkat pendidikan SM, daerah terjangkau, rasio siswa per guru untuk tingkat pendidikan SD, angka mengulang untuk tingkat pendidikan SM, angka putus sekolah, APK untuk tingkat pendidikan SMP dan SM, serta angka melanjutkan untuk tingkat pendidikan SM.

Pada 9 *item* yang lainnya, *Student T-test* menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara periode 1 dan periode 2. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan secara signifikan dari *item* tersebut dengan adanya pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dalam APBN. Sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

4.4 Uji Non Parametrik (Uji Mann Whitney)

Dari 27 *item* yang dianalisis dengan menggunakan uji non parametrik (Uji Mann Whitney) ternyata terdapat beberapa *item* yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok sebelum penerapan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dengan kelompok yang telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja dalam APBN. Adapun *item* yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan adalah indikator rasio siswa per sekolah untuk tingkat pendidikan SMP, rasio siswa per kelas untuk tingkat pendidikan SMP dan SM, persentase ruang UKS, persentase ruang komputer, persentase ruang laboratorium untuk tingkat pendidikan SM, tingkat pelayanan sekolah, persentase guru berwenang mengajar untuk tingkat pendidikan SD dan SM, rasio guru per siswa untuk tingkat pendidikan SM, angka mengulang untuk tingkat pendidikan SD dan SMP, persentase kelas milik baik untuk tingkat pendidikan SD, serta persentase siswa swasta. Sedangkan *item* yang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan adalah indikator rasio siswa per kelas untuk tingkat pendidikan SD, rasio kelas per ruang kelas, angka lulusan untuk tingkat pendidikan SM, persentase kelas milik baik untuk tingkat pendidikan SMP dan SM, serta angka melanjutkan untuk tingkat pendidikan SMP.

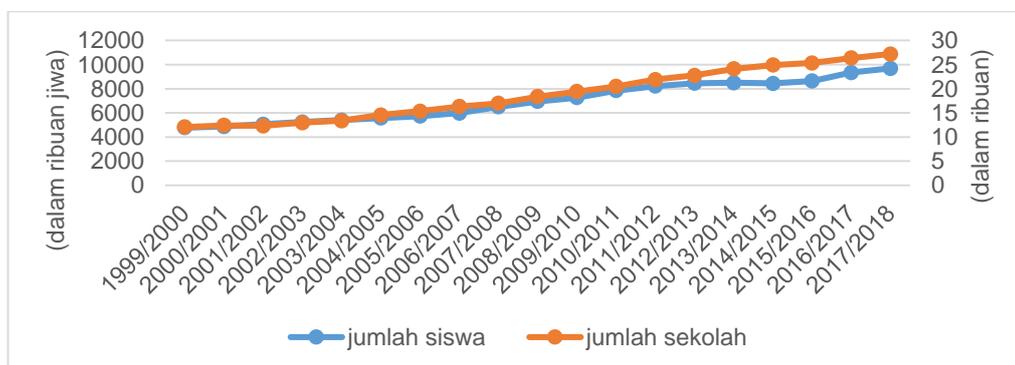
4.5 Analisis

Dari total 48 *item* yang dianalisa, diperoleh bahwa 31 *item* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok dengan pengalokasian anggaran mencapai minimal 20 persen dan yang tidak. Indikator yang menunjukkan perbedaan yang signifikan pada seluruh tingkat pendidikan adalah persentase ruang uks, persentase ruang komputer, tingkat pelayanan sekolah, daerah keterjangkauan, angka mengulang, angka putus sekolah, dan persentase siswa swasta. Sedangkan indikator yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada sebagian tingkat pendidikan yang dianalisis adalah rasio siswa per sekolah, rasio siswa per kelas, persentase ruang laboratorium, persentase guru berwenang mengajar, rasio guru per siswa, persentase kelas milik baik, APK, dan angka melanjutkan.

4.5.1 Rasio Siswa per Sekolah

Dengan menggunakan uji satu arah ($H_1: \mu_1 > \mu_2$) untuk rasio siswa per sekolah diperoleh kesimpulan adanya penolakan terhadap hipotesis null. Hal ini berarti rasio siswa per sekolah dari periode 1 lebih besar dibandingkan dengan periode 2. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen mampu menurunkan rasio siswa per sekolah, khususnya untuk tingkat pendidikan SMP dan SM. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SD, tidak terjadi penurunan rasio siswa per sekolah secara signifikan. Bahkan pada tingkat pendidikan SD, rasio siswa per sekolah sebelum dan sesudah pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (lampiran 3).

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Siswa dan Jumlah Sekolah SM



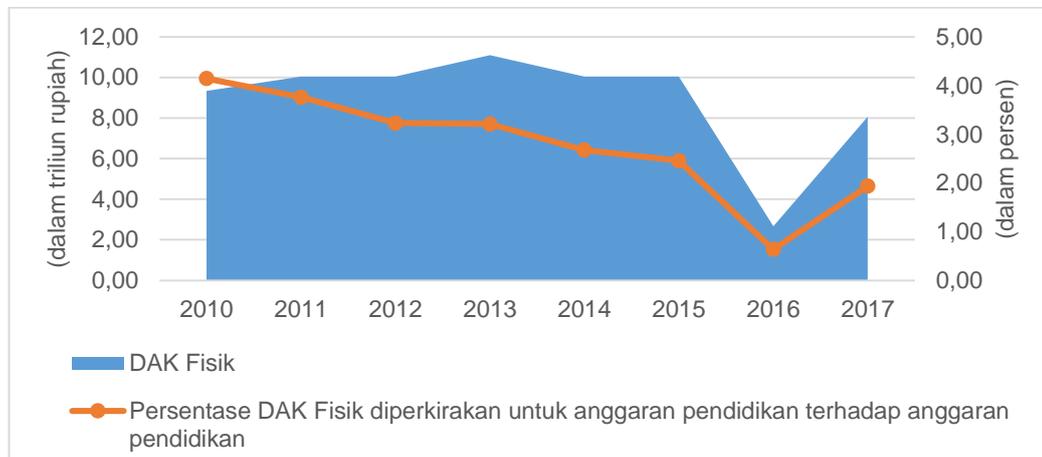
Sumber: Kementerian Pendidikan, diolah

Rasio siswa per sekolah merupakan angka perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah yang ada. Rasio siswa per sekolah akan mengalami

penurunan apabila jumlah siswa menurun dengan jumlah sekolah tetap atau jumlah siswa tetap namun terjadi penambahan jumlah sekolah.

Gambar 3 menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, jumlah siswa SM terus mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penurunan rasio siswa per sekolah diakibatkan bertambahnya jumlah sekolah, khususnya pada tingkat pendidikan SM. Penambahan jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan penambahan jumlah siswa merupakan penyebab menurunnya rasio siswa per sekolah. Hal ini diperkuat dengan adanya alokasi DAK fisik untuk anggaran pendidikan.

Gambar 4. *Perkembangan DAK Fisik yang Diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan dan Persentasenya terhadap Anggaran Pendidikan*



Sumber: Kementerian Keuangan

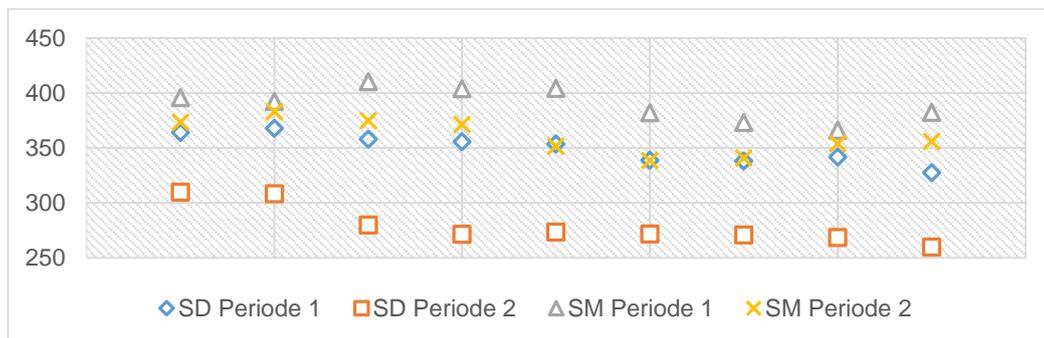
Semenjak tahun 2010 muncul nomenklatur baru dalam komponen anggaran pendidikan, yaitu DAK fisik. Alokasi anggaran pendidikan yang berupa DAK fisik merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dimana salah satunya berupa pembangunan sekolah. Dengan adanya nomenklatur DAK Fisik untuk fungsi pendidikan, percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilaksanakan.

Penurunan rasio siswa per sekolah tidak terjadi pada tingkat pendidikan SD. Hal ini terjadi dimungkinkan karena arah kebijakan pemerintah yang masih terfokus pada pendidikan menengah dan perguruan tinggi (Kementerian Keuangan RI, 2018).

4.5.2 Rasio Siswa per Kelas

Berdasarkan uji Mann Whitney yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode 1 dengan periode 2, khususnya pada tingkat pendidikan SMP dan SM (lampiran 4). Nilai rata-rata rasio siswa per kelas pada periode 1 adalah 38,12 dan 37,09 untuk tingkat pendidikan SMP dan SM. Sedangkan pada periode 2 nilai rata-rata rasio siswa per kelas untuk tingkat pendidikan SMP dan SM masing-masing sebesar 31,20 dan 31,73. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata rasio siswa per kelas pada periode 2 cenderung mengalami penurunan dibandingkan nilai rata-rata rasio siswa per kelas pada periode 1. Gambar 5 juga menunjukkan bahwa data rasio siswa per kelas dari periode 1 memiliki kecenderungan selalu berada di atas data rasio siswa per kelas dari periode 2 untuk tingkat pendidikan SMP ataupun SM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data rasio siswa per kelas pada periode 2 cenderung lebih rendah daripada periode 1.

Gambar 5. Perkembangan Rasio Siswa per Kelas pada Tingkat Pendidikan SMP dan SM per Periode



Sumber: Kementerian Pendidikan, diolah

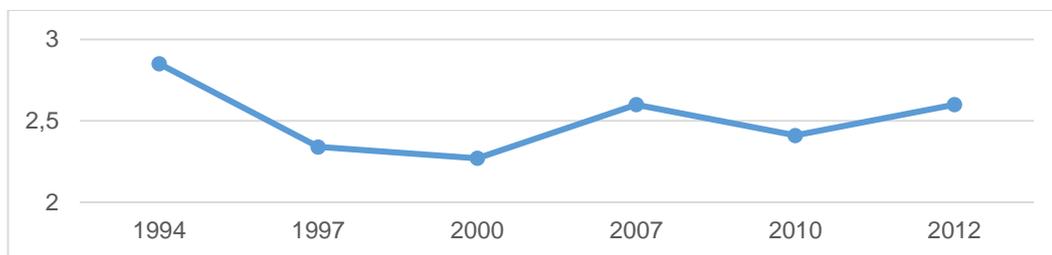
Penurunan rasio siswa per kelas dapat dikarenakan adanya penurunan jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas tetap atau jumlah siswa tetap dengan peningkatan jumlah kelas. Berdasarkan gambar 15 dapat dilihat bahwa jumlah siswa sekolah menengah (baik SMP ataupun SM) cenderung terus bertambah. Sehingga penyebab penurunan rasio siswa per kelas ialah terjadinya penambahan jumlah kelas. Peningkatan jumlah siswa tidak sebanding dengan penambahan jumlah kelas.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja APBN sebagian dialokasikan untuk pembangunan fisik ruang kelas. Pembangunan sarana dan prasarana melalui DAK fisik merupakan salah satu cara yang ditempuh

pemerintah dalam rangka memperbaiki kualitas belanja di bidang pendidikan (Kementerian Keuangan RI, 2018).

Penurunan rasio siswa per kelas tidak terjadi pada tingkat pendidikan SD. Hal ini terjadi karena pembangunan sarana pendidikan masih difokuskan pada pendidikan menengah dan perguruan tinggi (Kementerian Keuangan RI, 2018). Apabila dilihat pada gambar 15, jumlah siswa SD cenderung stabil bahkan mengarah kepada adanya penurunan jumlah siswa. Sedangkan pada uji hipotesis yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari rasio siswa per kelas untuk tingkat pendidikan SD. Dengan kata lain rasio siswa per kelas adalah sama.

Gambar 6. Perkembangan Angka Fertilitas



Sumber: BPS, diolah

Dari dua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah siswa SD diikuti dengan penurunan jumlah kelas di SD yang dapat digunakan. Hal ini yang menyebabkan nilai rasio siswa per kelas adalah sama. Penurunan jumlah siswa SD lebih dikarenakan adanya penurunan angka kelahiran. Pada tahun 1994 angka fertilitas mencapai 2,8, namun di tahun 2012 angka fertilitasnya hanya sebesar 2,6. Sedangkan penurunan jumlah kelas yang dapat digunakan terjadi karena adanya kebijakan penggabungan (*regrouping*) sekolah-sekolah terutama SD. Kebijakan penggabungan sekolah, khususnya SD dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Tujuan penggabungan ini adalah tercapainya efisiensi dan efektifitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai, khususnya efisiensi penggunaan anggaran belanja negara (Purwaningsih, 2014). Namun kebijakan ini hanya berlaku secara regional, sehingga dasar hukum yang digunakan hanya berupa Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.

4.5.3 Rasio Kelas per Ruang Kelas

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara periode 1 dengan periode 2 pada semua tingkat pendidikan. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran

pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja APBN tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasio kelas per ruang kelas. Hal ini dikarenakan setiap pembangunan ruang kelas baru, biasanya diikuti dengan adanya penambahan ruang kelas. Sehingga jumlah kelas dengan ruang kelas cenderung paralel.

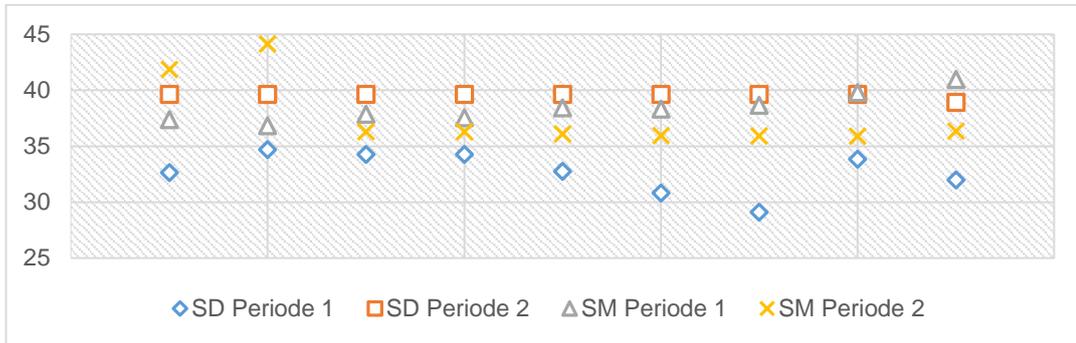
4.5.4 Persentase Perpustakaan

Persentase perpustakaan dari periode 1 dengan periode 2 tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja APBN tidak memberikan pengaruh terhadap persentase perpustakaan. Jumlah DAK Fisik yang kurang dari 5 persen terhadap total anggaran pendidikan menyebabkan pembangunan fisik lebih difokuskan pada pembangunan ruang kelas (gambar 4). Penambahan jumlah sekolah tidak disertai dengan penambahan kelengkapannya berupa perpustakaan. Minimnya ruang perpustakaan yang dimiliki merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Tingkat literasi di Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 61 negara yang di survey (Miller & McKenna, 2016). Bagaimana siswa dapat gemar membaca apabila ruang perpustakaan minim? Hal ini dapat pula mengindikasikan bahwa pembangunan fisik sekolah masih minim dengan fasilitas. Pembangunan ruang perpustakaan belum menjadi prioritas bagi pemerintah. Padahal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, keberadaan perpustakaan menjadi syarat mutlak.

4.5.5 Persentase Ruang UKS

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari persentase ruang UKS periode 1 dengan periode 2. Nilai rata-rata persentase ruang UKS pada periode 1 adalah 32,71 dan 38,43 untuk tingkat pendidikan SMP dan SM. Sedangkan pada periode 2 nilai rata-rata rasio siswa per kelas untuk tingkat pendidikan SMP dan SM masing-masing sebesar 39,56 dan 37,65. Gambar 7 menunjukkan bahwa data persentase ruang UKS di tingkat pendidikan SMP dari periode 1 memiliki kecenderungan dibawah periode 2. Namun untuk tingkat pendidikan SM menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Atau dapat dikatakan bahwa persentase ruang UKS periode 1 cenderung berada diatas periode 2. Hal ini mengindikasikan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih difokuskan pada pembangunan ruang kelas dan sekolah dengan sedikit mengabaikan fasilitas pendidikan pendukungnya.

Gambar 7. Perkembangan Persentase Ruang UKS pada Tingkat Pendidikan SMP dan SM Per Periode

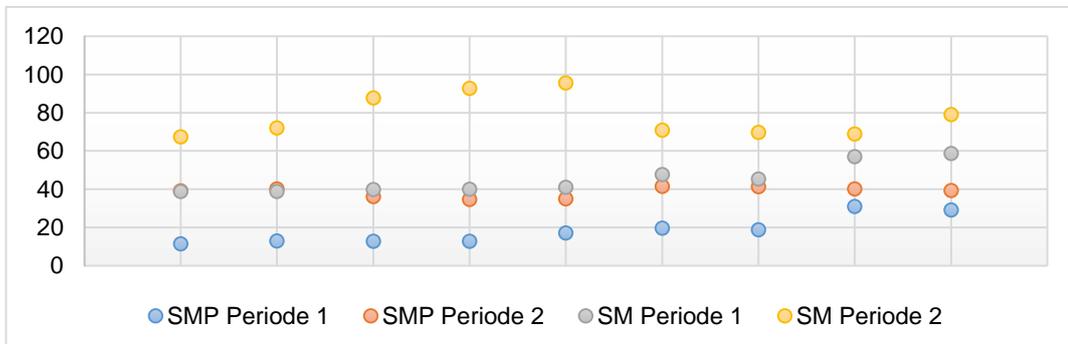


Sumber: Kemendikbud, diolah

4.5.6 Persentase Ruang Komputer

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari persentase ruang komputer kelompok. Nilai rata-rata persentase ruang komputer pada periode 1 adalah 18,44 dan 45,27 untuk tingkat pendidikan SMP dan SM. Sedangkan pada periode 2 nilai rata-rata rasio siswa per kelas untuk tingkat pendidikan SMP dan SM masing-masing sebesar 38,63 dan 78,28. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata persentase ruang komputer pada periode 2 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan nilai rata-rata persentase ruang komputer pada periode 1. Gambar 8 juga menunjukkan bahwa data persentase ruang komputer dari periode 1 memiliki kecenderungan selalu berada di bawah data persentase ruang komputer dari periode 2 untuk tingkat pendidikan SMP ataupun SM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data persentase ruang komputer pada periode 2 cenderung lebih tinggi daripada periode 1.

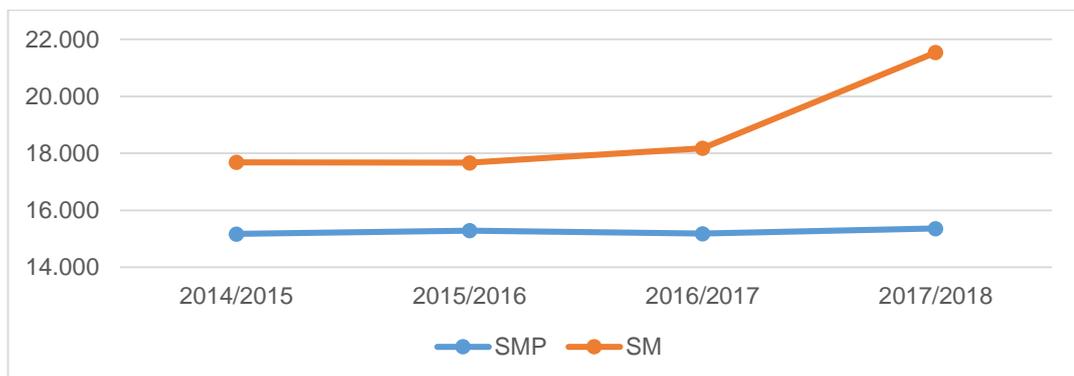
Gambar 8. Persentase Ruang Komputer pada Tingkat Pendidikan SMP dan SM



Sumber: Kemendikbud, diolah

Peningkatan persentase ruang komputer ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh peningkatan alokasi anggaran pendidikan. Semenjak tahun 2015 pemerintah melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sehingga sekolah harus membangun ruang komputer, apabila ingin melakukan ujian secara mandiri. Kemampuan sebuah sekolah untuk melakukan ujian mandiri merupakan salah satu cara sekolah untuk melakukan promosi dalam rangka menarik calon siswa untuk masuk ke sekolah tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya tren peningkatan jumlah ruang komputer sejak tahun ajaran 2014/2015 (gambar 9). Peningkatan jumlah ruang komputer secara signifikan terjadi pada tingkat pendidikan SM. Hal ini dikarenakan UNBK dilaksanakan terlebih dahulu di tingkat pendidikan SM. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan persentase ruang komputer lebih dikarenakan kebutuhan sekolah untuk melaksanakan UNBK.

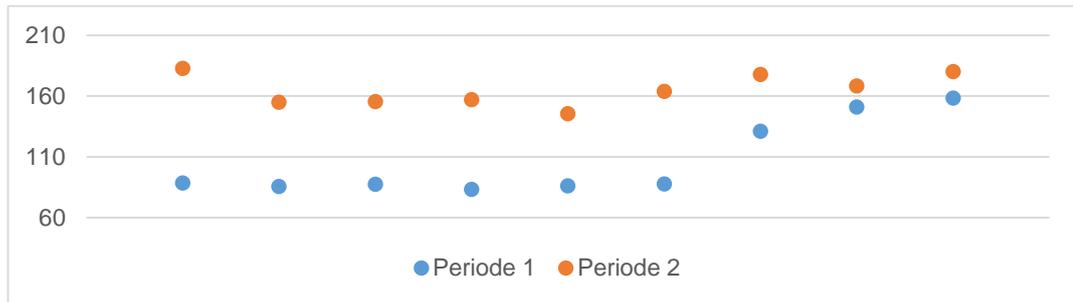
Gambar 9. *Perkembangan Jumlah Ruang Komputer*



Sumber: Kemendikbud, diolah

4.5.7 Persentase Ruang Laboratorium

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari persentase ruang laboratorium periode 1 dengan periode 2 pada tingkat pendidikan SM. Nilai rata-rata persentase ruang laboratorium adalah 106,67 dan 165,28 untuk periode 1 dan 2 pada tingkat pendidikan SM. Gambar 10 menunjukkan bahwa data persentase ruang laboratorium di tingkat pendidikan SM dari periode 1 juga memiliki kecenderungan berada dibawah periode 2.

Gambar 10. Perkembangan Persentase Ruang Laboratorium untuk SM per Periode

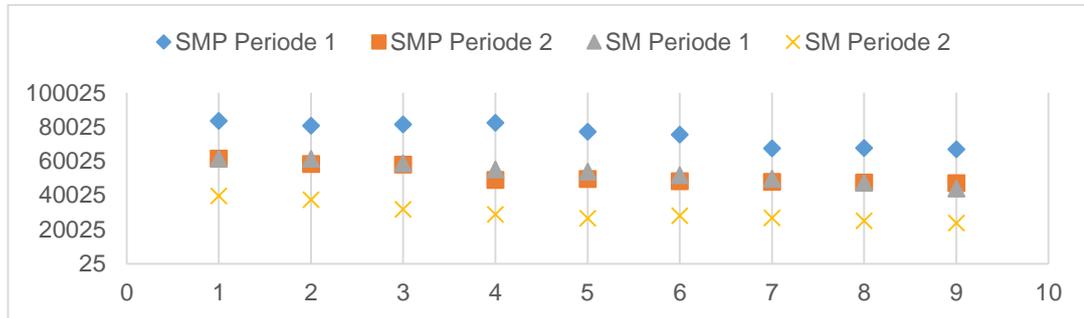
Sumber: Kemendikbud, diolah

Peningkatan alokasi anggaran pendidikan mampu meningkatkan persentase ruang laboratorium untuk tingkat pendidikan SM. Namun hal ini tidak berlaku pada tingkat pendidikan SMP. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan SM lebih membutuhkan berbagai jenis laboratorium, sedangkan SMP masih terbatas.

4.5.8 Tingkat Pelayanan Sekolah

Tingkat pelayanan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah pendidik usia masuk sekolah atau lulusan dengan sekolah ekuivalen pada jenjang pendidikan tertentu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013). Berdasarkan uji Mann Whitney yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode 1 dengan periode 2, khususnya pada tingkat pendidikan SMP dan SM. Nilai rata-rata tingkat pelayanan sekolah pada periode 1 adalah 75.933 dan 53.751 untuk tingkat pendidikan SMP dan SM. Sedangkan pada periode 2 nilai rata-rata tingkat pelayanan sekolah untuk tingkat pendidikan SMP dan SM masing-masing sebesar 51.957 dan 29.829. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata tingkat pelayanan sekolah pada periode 2 cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode 1. Gambar 11 juga menunjukkan bahwa data tingkat pelayanan sekolah dari periode 1 memiliki kecenderungan selalu berada di atas periode 2 untuk tingkat pendidikan SMP ataupun SM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tingkat pelayanan sekolah pada periode 2 cenderung lebih rendah daripada periode 1.

Gambar 11. Perkembangan Tingkat Pelayanan Sekolah per Periode pada Tingkat Pendidikan SMP dan SM



Sumber: Kemendikbud, diolah

Penurunan rasio ini dapat dikarenakan adanya penurunan jumlah siswa dengan jumlah sekolah tetap atau jumlah siswa tetap dengan peningkatan jumlah sekolah. Berdasarkan gambar 16 dapat dilihat bahwa jumlah siswa menengah cenderung terus bertambah. Sehingga dapat dikatakan penyebab penurunan tingkat pelayanan sekolah adalah terjadinya penambahan jumlah sekolah. Peningkatan jumlah siswa tidak sebanding dengan penambahan jumlah sekolah. Penambahan jumlah sekolah ini merupakan salah satu hasil dari pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan menggunakan alokasi DAK fisik untuk fungsi pendidikan.

4.5.9 Daerah Terjangkau

Daerah keterjangkauan adalah perbandingan antara daerah terjangkau siswa dengan daerah terjangkau sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013). Dengan menggunakan uji satu arah dengan ($H_1: \mu_1 > \mu_2$) untuk daerah terjangkau, maka dapat disimpulkan bahwa daerah terjangkau dari periode 1 lebih besar dibandingkan dengan periode 2. Daerah terjangkau akan mengalami penurunan apabila jumlah usia sekolah tetap dengan jumlah sekolah yang bertambah atau jumlah usia sekolah turun dengan jumlah sekolah tetap (tabel 1).

Tabel 1. Simulasi Penyebab Perubahan DT

DT	KPSU (Kepadatan Usia Sekolah)	KSEK (Kepadatan Sekolah)	Jumlah Usia Sekolah	Jumlah Sekolah
↓	0	↑	0	↑
↑	↑	0	↑	0
↓	↓	0	↓	0
↑	0	↓	0	↓

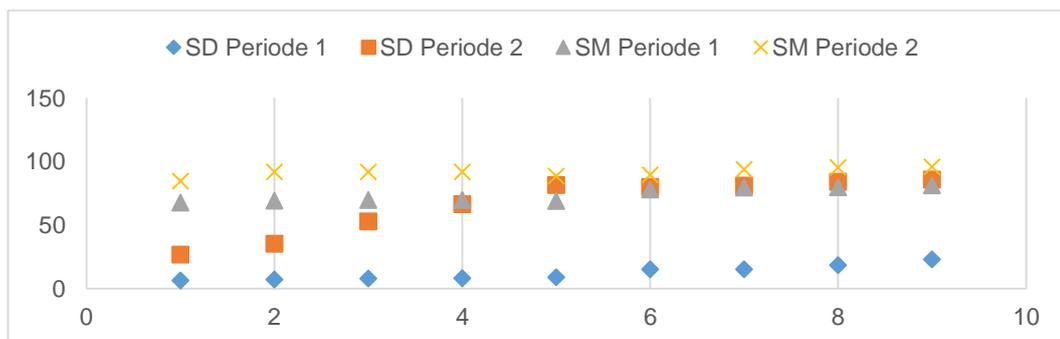
Sumber : Kemendikbud, diolah

Gambar 16 menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir, jumlah siswa terus mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa daerah terjangkau menurun diakibatkan bertambahnya jumlah sekolah (tabel 1). Penambahan jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan penambahan jumlah usia sekolah merupakan penyebab menurunnya daerah terjangkau. Peningkatan jumlah siswa tidak sebanding dengan penambahan jumlah sekolah. Penambahan jumlah sekolah ini merupakan hasil dari pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan menggunakan alokasi DAK fisik untuk fungsi pendidikan.

4.5.10 Persentase Guru Berwenang Mengajar

Persentase guru berwenang mengajar merupakan persentase guru yang berwenang mengajar dikaitkan dengan ijazah yang dimiliki sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013). Berdasarkan uji Mann Whitney yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode 1 dengan periode 2, khususnya pada tingkat pendidikan SD dan SM (lampiran 4). Nilai rata-rata persentase guru berwenang mengajar pada periode 1 adalah 12,34 dan 73,84 untuk tingkat pendidikan SD dan SM. Sedangkan pada periode 2 nilai rata-rata persentase guru berwenang mengajar untuk tingkat pendidikan SD dan SM masing-masing sebesar 66,08 dan 91,54. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata persentase guru berwenang mengajar pada periode 2 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan periode 1. Gambar 12 juga menunjukkan bahwa data persentase guru berwenang mengajar dari periode 1 memiliki kecenderungan selalu berada di bawah periode 2 untuk tingkat pendidikan SD ataupun SM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase guru berwenang mengajar pada periode 2 cenderung lebih tinggi daripada periode 1.

Gambar 12.. Perkembangan Persentase Guru Berwenang Mengajar berdasarkan Kelompok pada Tingkat Pendidikan SD dan SM



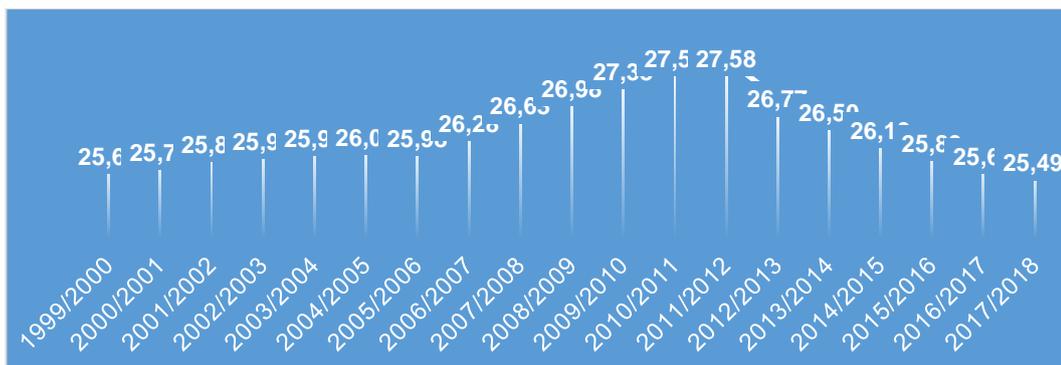
Sumber: Kemendikbud, diolah

Peningkatan persentase guru berwenang mengajar ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh pengalokasian anggaran sebesar 20 persen secara langsung. Peningkatan persentase guru berwenang mengajar ini lebih disebabkan karena berlakunya UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tersebut mensyaratkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademis minimal sarjana. Apabila kualifikasi tersebut tidak terpenuhi maka guru yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat dan tidak memperoleh sertifikasi. Penerapan peraturan perundang-undangan tersebut, mengharuskan guru untuk meningkatkan kualifikasinya. Sehingga secara otomatis persentase guru berwenang mengajar akan mengalami peningkatan.

4.5.11 Rasio Siswa per Guru

Lampiran 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode 1 dengan periode 2. Sehingga akan dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan hipotesis alternatif (H_1): $\mu_1 > \mu_2$ untuk rasio siswa per guru. Berdasarkan uji yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa rasio siswa per guru dari periode 1 lebih besar dibandingkan dengan periode 2 pada tingkat pendidikan SD. Penurunan rasio siswa per guru dapat disebabkan oleh penurunan jumlah siswa dengan jumlah guru relatif tetap atau peningkatan jumlah guru dengan jumlah siswa relatif tetap. Sedangkan untuk tingkat pendidikan sekolah menengah, tidak terjadi penurunan rasio siswa per guru secara signifikan.

Gambar 13. Perkembangan Jumlah Siswa SD (dalam juta jiwa)



Sumber: Kemendikbud, diolah

Jumlah siswa SD semenjak tahun ajaran 2011/2012 cenderung mengalami tren penurunan. Hal ini berarti bahwa penurunan rasio siswa per guru lebih disebabkan adanya penurunan jumlah siswa SD. Penurunan jumlah siswa SD tidak sebanding dengan peningkatan jumlah guru SD.

4.5.12 Angka Lulusan

Angka lulusan merupakan persentase jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan tertentu yang lulus (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013). Angka lulusan dari periode 1 dengan periode 2 tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen tidak memberikan pengaruh terhadap angka lulusan.

Untuk dinyatakan lulus, maka siswa harus melewati sebuah proses ujian. Tidak adanya perubahan yang signifikan ini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa untuk menghadapi ujian relatif sama. Tidak adanya peningkatan kemampuan dan kompetensi siswa dalam menghadapi ujian. Hal ini mengindikasikan belum adanya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan skor PISA, pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara. Hal ini menguatkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah.

4.5.13 Angka Mengulang

Analisis akan dilanjutkan dengan menggunakan hipotesis alternatif (H_1): $\mu_1 > \mu_2$ untuk angka mengulang. Uji tersebut menunjukkan hasil bahwa hipotesis ditolak, atau dapat dikatakan bahwa angka mengulang dari periode 1 lebih besar dibandingkan dengan periode 2. Penurunan angka mengulang ini dapat disebabkan oleh penurunan jumlah siswa yang mengulang. Penurunan angka mengulang dapat disebabkan adanya sedikit perbaikan dalam kualitas pendidikan di Indonesia, namun perbaikan itu belum secara menyeluruh dan terstandarisasi. Penurunan angka mengulang yang tidak diikuti dengan penurunan angka kelulusan, dapat menjadi indikasi belum meratanya pembangunan pendidikan di Indonesia. Ujian nasional merupakan alat yang digunakan untuk menentukan siswa lulusan atau tidak, mempunyai standar yang sama di seluruh Indonesia. Sedangkan ujian semester yang dilakukan untuk menentukan siswa mengulang atau tidak biasanya hanya berlaku secara regional dengan standar yang telah disesuaikan dengan daerah tersebut.

4.5.14 Angka Putus Sekolah

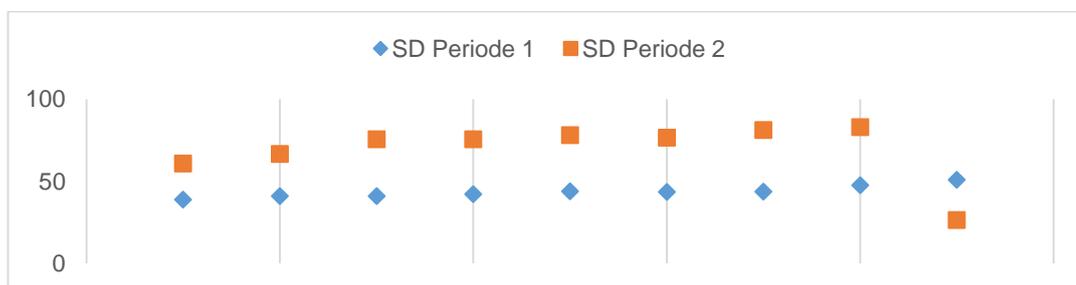
Analisis akan dilanjutkan dengan menggunakan hipotesis alternatif (H_1): $\mu_1 > \mu_2$ untuk angka putus sekolah. Uji tersebut menunjukkan hasil bahwa hipotesis ditolak, atau dapat dikatakan bahwa angka putus sekolah dari periode 1 lebih

besar dibandingkan dengan periode 2. Penurunan angka putus sekolah dikarenakan adanya bantuan yang diberikan pemerintah khususnya siswa miskin melalui program Bantuan Siswa Miskin (BSM) ataupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BSM ini dilaksanakan semenjak tahun 2013 sebagai kompensasi adanya kenaikan BBM pada saat itu. BOS juga membantu siswa yang nyaris miskin dalam rangka meringankan biaya pendidikan yang ditanggung. Dengan adanya BOS, orang tua siswa tidak perlu memikirkan biaya iuran siswa. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar iuran sekolah dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak yang lainnya.

4.5.15 Persentase Kelas Milik Baik

Persentase ruang kelas milik baik merupakan persentase jumlah ruang kelas milik baik dibandingkan dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013). Berdasarkan uji Mann Whitney yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode 1 dengan periode 2, khususnya pada tingkat pendidikan SD. Nilai rata-rata kelas milik baik pada periode 1 adalah 43,69 sedangkan rata-rata periode 2 sebesar 69,4. Sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata persentase kelas milik baik pada periode 2 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan periode 1. Gambar 14 juga menunjukkan bahwa data persentase kelas milik baik dari periode 1 memiliki kecenderungan selalu berada di bawah periode 2 untuk tingkat pendidikan SD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase kelas milik baik pada periode 2 cenderung lebih tinggi daripada periode 1.

Gambar 14. Perkembangan Persentase Kelas Milik Baik per Periode



Sumber: Kemendikbud, diolah

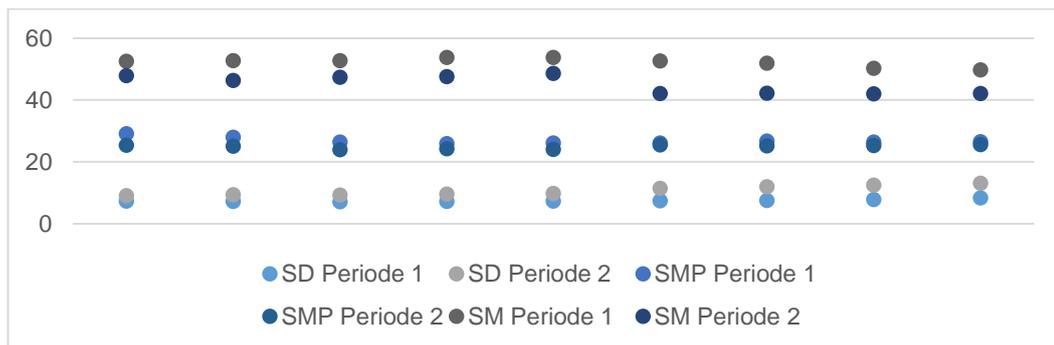
Peningkatan ruang kelas milik baik pada tingkat pendidikan SD bukan terjadi karena adanya penambahan jumlah kelas pada tingkat pendidikan SD secara signifikan. Peningkatan ruang kelas milik baik lebih dikarenakan adanya

penggabungan kelas yang berakibat pada menurunnya jumlah kelas pada tingkat pendidikan SD.

4.5.16 Persentase Siswa Swasta

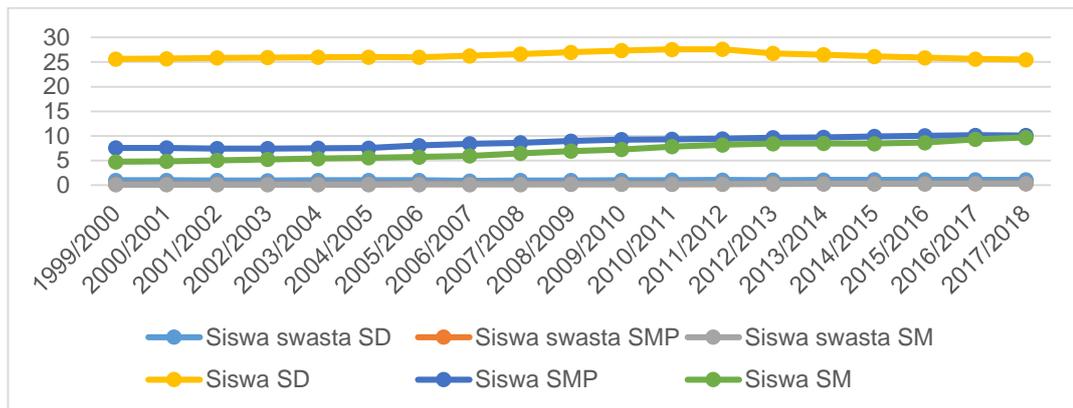
Berdasarkan uji Mann Whitney yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode 1 dengan periode 2.

Gambar 15. Perkembangan Persentase Siswa Swasta Berdasarkan Kelompok dan Tingkat Pendidikan



Sumber: Kemendikbud, diolah

Gambar 15 menunjukkan bahwa ada kecenderungan persentase siswa swasta pada tingkat pendidikan SMP dan SM dari periode 1 berada di atas data dari kelompok dua. Hal ini sejalan dengan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata periode 1 untuk tingkat pendidikan SMP dan SM masing-masing sebesar 26,8 dan 52,24. Sedangkan rata-rata untuk periode 2 masing-masing sebesar 24,9 dan 45,12. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat pendidikan SMP dan SM, terjadi penurunan persentase siswa swasta. Penurunan siswa swasta ini dapat disebabkan oleh menurunnya jumlah siswa swasta dengan jumlah siswa tetap, atau jumlah siswa swasta tetap namun terjadi penurunan jumlah siswa. Berdasarkan gambar 16 dapat dilihat bahwa jumlah siswa untuk tingkat pendidikan SMP dan SM cenderung meningkat. Sehingga penyebab penurunan rasio siswa swasta adalah adanya peningkatan jumlah siswa yang lebih besar dibandingkan peningkatan jumlah siswa swasta pada tingkat pendidikan SMP dan SM.

Gambar 16. Perkembangan Jumlah Siswa dan Siswa Swasta (Dalam Juta Jiwa)

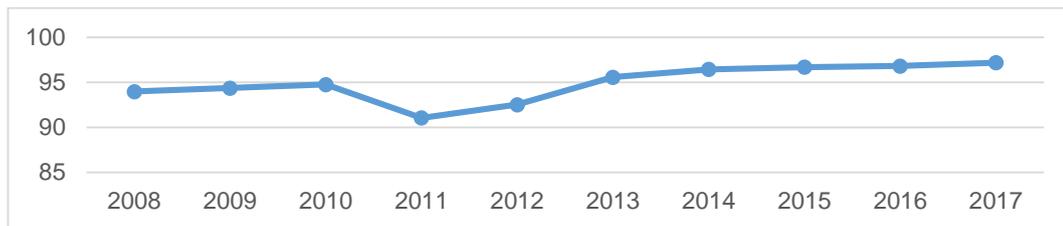
Sumber: Kemendikbud, diolah

Pada tingkat pendidikan SD, terdapat kecenderungan data persentase siswa swasta dari periode 1 lebih kecil dibandingkan dengan periode 2 (gambar 15). Nilai rata-rata persentase siswa swasta dari periode 1 lebih kecil dari periode 2. Peningkatan persentase siswa swasta pada tingkat pendidikan ini lebih disebabkan adanya kecenderungan penurunan jumlah siswa SD. Perubahan persentase siswa swasta secara signifikan baik pada tingkat pendidikan SD, SMP ataupun SM lebih disebabkan adanya perubahan dari jumlah siswa.

4.5.17 Angka Partisipasi Kasar

Hasil *Student T-test* pada APK menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara periode 1 dan 2. Sehingga analisis akan dilanjutkan dengan menggunakan hipotesis alternatif (H_1): $\mu_1 < \mu_2$ untuk APK. Uji tersebut menunjukkan hasil bahwa hipotesis ditolak, atau dapat dikatakan bahwa angka mengulang dari periode 1 lebih kecil dibandingkan dengan periode 2. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan keinginan masyarakat untuk sekolah. Selain itu peningkatan APK juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan wilayah untuk menampung penduduk usia sekolah. Peningkatan kemampuan ini terjadi sebagai salah satu akibat dibangunnya sekolah dan ruang kelas baru.

Namun peningkatan APK secara signifikan hanya terjadi pada tingkat pendidikan SMP dan SM. APK untuk tingkat pendidikan SD tidak terjadi perubahan yang signifikan. Gambar 17 menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan SD, terjadi kecenderungan peningkatan APM. Hal ini dapat diartikan adanya peningkatan kemampuan sistem pendidikan untuk menyerap penduduk usia sekolah. Sehingga penyebab tidak adanya perubahan APK secara signifikan adalah adanya penurunan jumlah penduduk usia sekolah SD.

Gambar 17. Perkembangan Angka Partisipasi Murni

Sumber: BPS, diolah

4.5.18 Angka Melanjutkan

Analisis akan dilanjutkan dengan menggunakan hipotesis alternatif (H_1): $\mu_1 < \mu_2$ untuk angka melanjutkan. Uji tersebut menunjukkan hasil bahwa hipotesis ditolak untuk tingkat pendidikan SM, atau dapat dikatakan bahwa angka melanjutkan dari periode 1 lebih kecil dibandingkan dengan periode 2. Peningkatan keinginan siswa untuk melanjutkan disebabkan oleh pemberian BOS untuk jenjang pendidikan SM. Kebijakan pemberian BOS dari SD sampai SMA sudah dimulai pada tahun 2008, namun baru berlaku di daerah-daerah tertentu. Pendidikan tingkat SD hingga SMA telah digratiskan di daerah-daerah tertentu dengan memadukan BOS dan BOS Daerah (Setiawan, 2013). Banyaknya SMK yang dibangun juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka melanjutkan di tingkat pendidikan SM.

Peningkatan angka melanjutkan secara signifikan hanya berlaku bagi tingkat pendidikan SM. Pada tingkat pendidikan SD dan SMP tidak ada perubahan yang signifikan dari angka melanjutkan, walaupun pada tingkat ini juga diberikan BOS. BOS untuk tingkat pendidikan SD dan SMP sudah diberikan sejak 2005, sehingga tidak ada perubahan angka melanjutkan secara lebih berarti.

5. Penutup

Adanya perbedaan yang signifikan pada indikator-indikator pendidikan, khususnya yang menyangkut pembangunan fisik, pada periode sebelum dengan sesudah pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dapat mengindikasikan adanya pengaruh alokasi anggaran terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN persen memberikan pengaruh terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya penyediaan dan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Namun pembangunan ini belum diikuti dengan peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas. Sebagian dari anggaran

pendidikan dialokasikan untuk DAK fisik, yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana. Namun jumlah DAK Fisik yang tidak pernah lebih dari 5 persen bahkan terdapat kecenderungan mengalami penurunan (secara persentase) menyebabkan pembangunan fisik lebih difokuskan pada pembangunan ruang kelas. Sedangkan fasilitas pendukung lainnya seperti UKS dan perpustakaan belum menjadi prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Alokasi anggaran pendidikan yang besar tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. Penurunan angka mengulang tidak diikuti dengan peningkatan angka kelulusan. Peningkatan guru berwenang mengajar lebih dikarenakan adanya penerapan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan guru memenuhi kualifikasi akademis minimal sarjana. Apabila kualifikasi akademis tersebut tidak terpenuhi, maka guru yang bersangkutan tidak bisa naik pangkat dan memperoleh sertifikasi.

Daftar Pustaka

- Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.
- Gehan, E. (1965). A generalized Two-Sample Wilcoxon test for Dounly Censored Data. *Biometrika Vol. 52, No. 3/4 (Dec., 1965)*, 650-653.
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2013). *Statistics for the Behavioral Sciences*. New York: Wadsworth Cengage Learning.
- Jalal, F., & Supriyadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Kementerian Keuangan RI. (2018). In *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2019* (pp. 4-20). Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). *Indikator Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Lim, D. (1996). *Explaining Economic Growth: A New Aanlitical Framework*. Vermont: Edwar Elgar.
- MacFarland, T. W., & Yates, J. M. (2017). *Introduction to Nonparametric Statistics for the Biological Sciences Using R*. Switzerland: Springer Nature.
- Miller, J. W., & McKenna, M. C. (2016). *World Literacy: How Countries Rank and Why It Matters*. New Britain: Central Connecticut State University.

- Muhardi. (2004). Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume XX No. 4*, 478-492.
- Park, H. M. (2008). *Univariate Analysis and Normality Test Using SAS, Stata, and SPSS*. Bloomington: The Trustees of Indiana University.
- Purwaningsih, I. (2014). *Implementasi Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Republika. (2017, Maret 07). *Daerah yang Alokasikan 20 Persen APBD untuk Pendidikan Bisa Dihitung Jari*. Retrieved from www.republika.co.id:https://republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/03/07/omfagx365-daerah-yang-alokasikan-20-persen-apbd-untuk-pendidikan-bisa-dihitung-jari
- Rini, E. S. (2012). *Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Prestasi Belajar Siswa dengan Minat Siswa Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kalasan Tahun Ajaran 2011/2012*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Schultz, T. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 1-17.
- Schultz, T. (1963). *The Economic Value of Education*. New York: Columbia University.
- Setiawan, A. (2013, November 27). *Sekolah Gratis SD dan SMA*. Retrieved from [www.setkab.go.id: http://setkab.go.id/sekolah-gratis-sd-dan-sma/](http://www.setkab.go.id:www.setkab.go.id/sekolah-gratis-sd-dan-sma/)
- Sudarsana, I. (n.d.). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1-14.
- Sukasni, A., & Efendy, H. (2017). The Problematic of Education System in Indonesia and Reform Agenda. *International Journal of Education Vo.9, NO.3*, 183-199.
- Supriadi, D. (2003). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tribunnews.com. (2017, April 24). *Mendikbud Muhadjir: Alokasi Dana Pendidikan dari APBD Masih Rendah*. Retrieved from [www.tribunnews.com: http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/24/mendikbud-muhadjir-alokasi-dana-pendidikan-dari-apbd-masih-rendah](http://www.tribunnews.com:www.tribunnews.com/nasional/2017/04/24/mendikbud-muhadjir-alokasi-dana-pendidikan-dari-apbd-masih-rendah)
- UNDP. (2018, September 17). *Human Development Reports*. Retrieved from [www.undp.org: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN#](http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN#)
- Warli, & Yuliana, E. (2011). Peningkatan Kreativitas Pemecahan Masalah Melalui Metode 'What's Another Way' pada materi bangun datar Siswa Kelas VII SMP. *Formatif*, 208-222.

Lampiran 1. Hasil uji Normalitas

Indikator	Jenis	Tingkat Pendidikan	Kode	Kelompok	Shapiro-Wilk's Statistic	Sig.	Keterangan	Kesimpulan
Ketersediaan Layanan	Rasio Siswa Per Sekolah	SD	A1X	1	0,977	0,949	Berdistribusi Normal	T-test
				2	0,913	0,340	Berdistribusi Normal	
		SMP	A1Y	1	0,950	0,686	Berdistribusi Normal	Non Parametik
				2	0,788	0,015	Tidak berdistribusi normal	
		SM	A1Z	1	0,955	0,742	Berdistribusi Normal	T-test
				2	0,929	0,471	Berdistribusi Normal	
	Rasio siswa Per Kelas	SD	A2X	1	0,833	0,048	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik
				2	0,915	0,355	Berdistribusi Normal	
		SMP	A2Y	1	0,885	0,177	Berdistribusi Normal	Non Parametik
				2	0,798	0,019	Tidak berdistribusi normal	
		SM	A2Z	1	0,892	0,209	Berdistribusi Normal	Non Parametik
				2	0,817	0,031	Tidak berdistribusi normal	
	Rasio Kelas Per Ruang Kelas	SD	A3X	1	0,892	0,211	Berdistribusi Normal	Non Parametik
				2	0,777	0,011	Tidak berdistribusi normal	
		SMP	A3Y	1	0,913	0,335	Berdistribusi Normal	Non Parametik
				2	0,758	0,007	Tidak berdistribusi normal	
		SM	A3Z	1	0,954	0,733	Berdistribusi Normal	Non Parametik
				2	0,805	0,023	Tidak berdistribusi normal	
	Persentase Perpustakaan Sekolah	SMP	A4Y	1	0,781	0,012	Tidak berdistribusi normal	T-test
				2	0,820	0,035	Tidak berdistribusi normal	
SM		A4Z	1	0,894	0,218	Berdistribusi Normal	T-test	
			2	0,892	0,208	Berdistribusi Normal		
	SMP	A5Y	1	0,910	0,314	Berdistribusi Normal	Non Parametik	

Indikator	Jenis	Tingkat Pendidikan	Kode	Kelompok	Shapiro-Wilk's Statistic	Sig.	Keterangan	Kesimpulan
	Persentase Ruang UKS	SM	A5Z	2	0,392	0,000	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik
				1	0,928	0,465	Berdistribusi Normal	
				2	0,617	0,000	Tidak berdistribusi normal	
	Persentase ruang komputer	SMP	A6Y	1	0,837	0,054	Berdistribusi Normal	Non Parametik
				2	0,869	0,119	Tidak berdistribusi normal	
		SM	A6Z	1	0,800	0,020	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik
				2	0,846	0,068	Tidak berdistribusi normal	
	Persentase ruang Laboratorium	SMP	A7Y	1	0,875	0,139	Berdistribusi Normal	T-test
				2	0,905	0,282	Berdistribusi Normal	
		SM	A7Z	1	0,718	0,002	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik
				2	0,933	0,510	Berdistribusi Normal	
	Keterjangkauan Layanan	Tingkat Pelayanan Sekolah	SMP	B1Y	1	0,850	0,075	Berdistribusi Normal
2					0,783	0,013	Tidak berdistribusi normal	
SM			B1Z	1	0,956	0,756	Berdistribusi Normal	Non Parametik
				2	0,879	0,154	Tidak berdistribusi normal	
Daerah Keterjangkauan		SD	B2X	1	0,982	0,975	Berdistribusi Normal	T-test
				2	0,926	0,445	Berdistribusi Normal	
		SMP	B2Y	1	0,935	0,533	Berdistribusi Normal	T-test
				2	0,871	0,125	Berdistribusi Normal	
		SM	B2Z	1	0,910	0,319	Berdistribusi Normal	T-test
				2	0,860	0,096	Berdistribusi Normal	
Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase Guru Berwening Mengajar	SD	C1X	1	0,873	0,131	Berdistribusi Normal	Non Parametik
				2	0,825	0,039	Tidak berdistribusi normal	
		SMP	C1Y	1	0,913	0,336	Berdistribusi Normal	T-test
				2	0,941	0,591	Berdistribusi Normal	

Indikator	Jenis	Tingkat Pendidikan	Kode	Kelompok	Shapiro-Wilk's Statistic	Sig.	Keterangan	Kesimpulan
Rasio Siswa per Guru	SM	C1Z	1	0,793	0,017	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik	
			2	0,940	0,584	Berdistribusi Normal		
	SD	C2X	1	0,876	0,141	Berdistribusi Normal	T-test	
			2	0,944	0,626	Berdistribusi Normal		
	SMP	C2Y	1	0,920	0,392	Berdistribusi Normal	T-test	
			2	0,964	0,840	Berdistribusi Normal		
	SM	C2Z	1	0,826	0,041	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik	
			2	0,881	0,160	Berdistribusi Normal		
	Angka Lulusan	SD	C3X	1	0,940	0,615	Berdistribusi Normal	T-test
				2	0,849	0,073	Berdistribusi Normal	
		SMP	C3Y	1	0,947	0,685	Berdistribusi Normal	T-test
				2	0,945	0,630	Berdistribusi Normal	
		SM	C3Z	1	0,944	0,649	Berdistribusi Normal	Non Parametik
				2	0,822	0,036	Tidak berdistribusi normal	
Angka Mengulang	SD	C4X	1	0,888	0,191	Berdistribusi Normal	Non Parametik	
			2	0,834	0,049	Tidak berdistribusi normal		
	SMP	C4Y	1	0,867	0,115	Berdistribusi Normal	Non Parametik	
			2	0,775	0,011	Tidak berdistribusi normal		
	SM	C4Z	1	0,919	0,385	Berdistribusi Normal	T-test	
			2	0,867	0,114	Berdistribusi Normal		
Angka Putus Sekolah	SD	C5X	1	0,920	0,392	Berdistribusi Normal	T-test	
			2	0,911	0,320	Berdistribusi Normal		
	SMP	C5Y	1	0,946	0,646	Berdistribusi Normal	T-test	
			2	0,928	0,460	Berdistribusi Normal		
	SM	C5Z	1	0,919	0,385	Berdistribusi Normal	T-test	
			2	0,867	0,114	Berdistribusi Normal		
	SD	C6X	1	0,925	0,433	Berdistribusi Normal	Non Parametik	

Indikator	Jenis	Tingkat Pendidikan	Kode	Kelompok	Shapiro-Wilk's Statistic	Sig.	Keterangan	Kesimpulan		
	Persentase Kelas Milik Baik	SMP	C6Y	2	0,728	0,003	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik		
				1	0,951	0,699	Berdistribusi Normal			
		SM	C6Z	2	0,665	0,001	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik		
				1	0,905	0,284	Berdistribusi Normal			
						2	0,570	0,000	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik
						1	0,905	0,284	Berdistribusi Normal	
Kesetaraan memperoleh Layanan	Persentase Siswa Swasta	SD	DX	1	0,791	0,016	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik		
				2	0,861	0,099	Berdistribusi Normal			
		SMP	DY	1	0,789	0,015	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik		
				2	0,821	0,035	Tidak berdistribusi normal			
		SM	DZ	1	0,870	0,124	Berdistribusi Normal	Non Parametik		
				2	0,782	0,013	Tidak berdistribusi normal			
Kepastian Memperoleh Layanan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	SD	E1X	1	0,887	0,186	Berdistribusi Normal	T-test		
				2	0,869	0,120	Berdistribusi Normal			
		SMP	E1Y	1	0,855	0,085	Berdistribusi Normal	T-test		
				2	0,959	0,790	Berdistribusi Normal			
		SM	E1Z	1	0,959	0,783	Berdistribusi Normal	T-test		
				2	0,944	0,626	Berdistribusi Normal			
	Angka Melanjutkan	SMP	E2Y	1	0,797	0,019	Tidak berdistribusi normal	Non Parametik		
				2	0,915	0,352	Berdistribusi Normal			
		SM	E2Z	1	0,948	0,670	Berdistribusi Normal	T-test		
				2	0,945	0,638	Berdistribusi Normal			

Lampiran 2. Hasil Uji Homogenitas Varian

Indikator	Jenis	Tingkat Pendidikan	Kode	Levene Statistic	Sig.	Keterangan
Ketersediaan Layanan	Rasio Siswa Per Sekolah	SD	A1X	3,435	0,082	Varian Homogen
		SMP	A1Z	0,103	0,753	Varian Homogen
	Persentase perpustakaan sekolah	SMP	A4Y	9,804	0,006	Varian tidak Homogen
		SM	A4Z	6,819	0,019	Varian tidak Homogen
	Persentase ruang Laboratorium	SMP	A7Y	15,522	0,001	Varian tidak Homogen
	Daerah Keterjangkauan	SD	B2X	3,740	0,071	Varian Homogen
		SMP	B2Y	0,451	0,511	Varian Homogen
		SM	B2Z	0,060	0,809	Varian Homogen
	Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase Guru Berwenang Mengajar	SMP	C1Y	9,055	0,008
Rasio Siswa per Guru		SD	C2X	1,133	0,303	Varian Homogen
		SMP	C2Y	0,035	0,853	Varian Homogen
Angka Lulusan		SD	C3X	8,491	0,011	Varian Homogen
		SMP	C3Y	0,268	0,612	Varian tidak Homogen
Angka Mengulang		SM	C4Z	4,732	0,045	Varian tidak Homogen
Angka Putus Sekolah		SD	C5X	1,991	0,177	Varian Homogen
		SMP	C5Y	0,274	0,608	Varian Homogen
		SM	C5Z	4,732	0,045	Varian tidak Homogen
Kepastian Memperoleh Layanan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	SD	E1X	9,095	0,008	Varian tidak Homogen
		SMP	E1Y	14,960	0,001	Varian tidak Homogen
		SM	E1Z	0,359	0,557	Varian Homogen
	Angka Melanjutkan	SM	E2Z	1,674	0,214	Varian Homogen

Lampiran 3. Hasil Student T-Test

Indikator	Jenis	Tingkat Pendidikan	Kode	t-test for Equality of Means			Kesimpulan
				t	df	Sig. (2-tailed)	
Ketersediaan Layanan	Rasio Siswa Per Sekolah	SD	A1X	-1,568	16,000	0,136	Tidak ada perbedaan yang signifikan
		SMP	A1Z	4,071	16,000	0,001	Terdapat perbedaan signifikan
	Persentase perpustakaan sekolah	SMP	A4Y	0,841	10,536	0,419	Tidak ada perbedaan yang signifikan
		SM	A4Z	0,009	9,630	0,993	Tidak ada perbedaan yang signifikan
	Persentase ruang Laboratorium	SMP	A7Y	-0,885	8,713	0,400	Tidak ada perbedaan yang signifikan
Keterjangkauan Layanan	Daerah Keterjangkauan	SD	B2X	7,359	16,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SMP	B2Y	11,687	16,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SM	B2Z	9,343	16,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase Guru Berwenang Mengajar	SMP	C1Y	-7,645	11,490	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
	Rasio Siswa per Guru	SD	C2X	7,087	16,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SMP	C2Y	-0,803	16,000	0,433	Tidak ada perbedaan yang signifikan
	Angka Lulusan	SD	C3X	-1,407	16,000	0,178	Tidak ada perbedaan yang signifikan
		SMP	C3Y	-1,348	8,115	0,214	Tidak ada perbedaan yang signifikan
	Angka Mengulang	SM	C4Z	2,891	9,356	0,017	Terdapat perbedaan signifikan
Angka Putus Sekolah	SD	C5X	7,402	16,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan	

Indikator	Jenis	Tingkat Pendidikan	Kode	t-test for Equality of Means			Kesimpulan
				t	df	Sig. (2-tailed)	
		SMP	C5Y	5,743	16,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SM	C5Z	2,891	9,356	0,017	Terdapat perbedaan signifikan
Kepastian Memperoleh Layanan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	SD	E1X	0,908	12,331	0,381	Tidak ada perbedaan yang signifikan
		SMP	E1Y	-8,481	9,030	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SM	E1Z	-10,024	16,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
	Angka Melanjutkan	SM	E2Z	-4,794	16,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan

Lampiran 4. Hasil Uji Mann Whitney

Indikator	Jenis	Tingkat Pendidikan	Kode	Mann-Whitney U	Asymp. Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
Ketersediaan Layanan	Rasio Siswa Per Sekolah	SMP	A1Y	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
	Rasio siswa Per Kelas	SD	A2X	21,000	0,085	Tidak ada perbedaan yang signifikan
		SMP	A2Y	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SM	A2Z	10,000	0,007	Terdapat perbedaan signifikan
	Rasio Kelas Per Ruang Kelas	SD	A3X	39,000	0,895	Tidak ada perbedaan yang signifikan
		SMP	A3Y	34,000	0,566	Tidak ada perbedaan yang signifikan
		SM	A3Z	21,000	0,085	Tidak ada perbedaan yang signifikan
	Persentase Ruang UKS	SMP	A5Y	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SM	A5Z	18,000	0,047	Terdapat perbedaan signifikan
	Persentase ruang komputer	SMP	A6Y	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SM	A6Z	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
	Persentase ruang Laboratorium	SM	A7Z	5,000	0,002	Terdapat perbedaan signifikan
Keterjangkauan Layanan	Tingkat Pelayanan Sekolah	SMP	B1Y	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SM	B1Z	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase Guru Berwenang Mengajar	SD	C1X	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SM	C1Z	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
	Rasio Siswa per Guru	SM	C2Z	16,000	0,031	Terdapat perbedaan signifikan
	Angka Lulusan	SM	C3Z	21,000	0,149	Tidak ada perbedaan yang signifikan
	Angka Mengulang	SD	C4X	3,000	0,001	Terdapat perbedaan signifikan
		SMP	C4Y	3,000	0,001	Terdapat perbedaan signifikan
Persentase Kelas Milik Baik	SD	C6X	9,000	0,005	Terdapat perbedaan signifikan	

Indikator	Jenis	Tingkat Pendidikan	Kode	Mann-Whitney U	Asymp. Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
		SMP	C6Y	31,000	0,402	Tidak ada perbedaan yang signifikan
	Persentase Kelas Milik Baik	SM	C6Z	31,000	0,402	Tidak ada perbedaan yang signifikan
Kesetaraan memperoleh Layanan	Persentase Siswa Swasta	SD	DX	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SMP	DY	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
		SM	DZ	0,000	0,000	Terdapat perbedaan signifikan
Kepastian Memperoleh Layanan	Angka Melanjutkan	SMP	E2Y	24,000	0,145	Tidak ada perbedaan yang signifikan